



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

**SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PADA ACARA LOKAKARYA PENYUSUNAN
RENCANA AKSI DAERAH
PENGURANGAN RISIKO BENCANA (RAD - PRB)
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Tanggal 20 Juni 2008
Pukul 07.30 Wib
Tempat Orchardz Hotel Pontianak

Yang saya hormati,

- Dirjen PUM Depdagri/Pejabat Yang Mewakili;
- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Pejabat Yang Mewakili;
- Para Kepala Dinas/Badan/Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan
- Para Narasumber;
- Para Undangan Peserta Lokakarya dan Hadirin yang berbahaga.

Selamat pagi dan salam sejahtera.

Terlebih dahulu saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan berkah rahmat dan hidayahNya jualah, pada hari yang berbahagia ini kita semua dapat menghadiri Acara Lokakarya Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) di Provinsi Kalimantan Barat. ini tidak lain, adalah karunia-Nya dan merupakan suatu langkah baru mengawali tugas saya setelah terpilih menjadi Gubernur Kalimantan Barat pada Pilkada tanggal 15 November 2007 yang lalu.

Untuk itu pada pertemuan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Kalimantan Barat dan segenap jajaran dinas/instansi terkait selaku anggota Satkorlak PB Provinsi Kalimantan Barat dan Satlak PB kabupaten/kota se-Kalimantan Barat yang telah memprakarsai dan secara bersama-sama mendukung penyusunan RAD-PRB ini. Menurut keyakinan dan pandangan saya, bahwa buku yang akan disusun sangat penting artinya bagi Daerah Kalimantan Barat dan bahkan Indonesia pada umumnya yang sebagian besar wilayahnya rawan terhadap bencana.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa dewasa ini masih ada opini yang berkembang di masyarakat bahkan di jajaran birokrasi yang mengindikasikan bahwa penanganan bencana itu tidak perlu di rancang dari sejak sebelum terjadinya bencana, dengan pertimbangan antara lain bahwa Kalimantan Barat cukup aman dari ancaman bencana yang ganas terutama bencana alam seperti Tsunami dan Gempa Bumi.

Asumsi-asumsi atau pemikiran semacam ini tentunya sangat tidak relevan untuk dijadikan dasar pijakan dalam pelaksanaan Manajemen Penanggulangan Bencana.

Itulah sebabnya dalam rangka pelaksanaan mekanisme pemerintahan di Kalimantan Barat, saya mencanangkan Visi Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008- 2013 adalah : "Terwujudnya Masyarakat Kalimantan Barat yang Beriman, Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya dan Sejahtera".

Visi tersebut diwujudkan dalam 10 (sepuluh) Misi Pembangunan yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 7 (Tujuh) Prioritas Sasaran Pembangunan dan 5 (Lima) Strategi Kebijakan Pembangunan Wilayah yaitu Wilayah Pembangunan Perkotaan, Wilayah Pembangunan Pedalaman, Wilayah Pembangunan Perbatasan, Wilayah Pembangunan Pesisir dan Wilayah Pembangunan Kepulauan yang akan dituangkan menjadi program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Visi pembangunan ini jika dikaitkan dengan pengurangan resiko bencana, menempatkan masyarakat Kalimantan Barat sebagai obyek pembangunan yang harus dilindungi dengan mewujudkan masyarakat yang beriman, sehat, cerdas, aman, berbudaya dan sejahtera sebagai tujuan pokok pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Melalui Iman masyarakat tentu amanah dalam menjaga kelestarian alam, dengan meningkatnya derajat kesehatan, masyarakat akan terhindar dan mempunyai kekebalan dari segala penyakit, melalui kecerdasan diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan pengetahuan dan keterampilannya untuk pengurangan risiko bencana baik untuk dirinya dan maupun orang lain, begitu juga kaitannya dengan terjaganya keamanan dari segala aspek ancaman bencana tentunya masyarakat merasa nyaman untuk tinggal dan berusaha di daerahnya, melalui masyarakat yang berbudaya diharapkan dapat menggugah dan menumbuhkan "kearifan lokal" di masing-masing daerah yang pada akhirnya dapat dikembangkan dan menjadi suatu pendekatan untuk pengurangan risiko bencana di daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, saya berharap bahwa melalui dokumen yang akan disusun, setidaknya kita telah mempunyai acuan yang jelas untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak yang mungkin timbul akibat terjadinya bencana.

Hadirin yang saya hormati.

Kita tidak harus menunggu terjadinya suatu bencana baru berbuat sesuatu. Pengalaman kejadian bencana sosial yang telah mengakibatkan kerugian jiwa dan materil yang relatif besar sudah cukup dijadikan pertimbangan untuk penyusunan RAD-PRB ini.

Upaya terkait dengan pengurangan dampak bencana ini memang bukan yang pertama kali. Beberapa daerah yang mengalami bencana terdahulu telah memulai penyusunan kegiatan serupa.

Pada level yang lebih tinggi misalnya tercermin dari dimasukkannya mitigasi dan penanggulangan bencana sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2007.

Hadirin sekalian yang berbahagia.

Perlu diketahui bersama, bahwa kesadaran untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana, tidak hanya terjadi di Indonesia, akan tetapi jauh sebelumnya telah dipelopori oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melalui beberapa resolusi. Dalam resolusinya PBB memprioritaskan upaya pengurangan risiko bencana sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagai salah satu contoh adalah resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB Nomor 63 Tahun 1999 yang menekankan pada pelaksanaan strategi internasional pengurangan risiko bencana dan juga Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 56/195 tahun 2001 sebagai upaya berkelanjutan bagi pengurangan risiko bencana menjadi agenda tahunan negara-negara peratifikasi resolusi.

Selain itu, dalam lingkup internasional kita juga telah mengenal beberapa kesepakatan seperti Strategi Yokohama dan Kerangka Aksi yang disepakati di Hyogo - Jepang.

Strategi Yokohama telah menitik beratkan pada upaya untuk melakukan kegiatan yang sistematis di dalam menerapkan upaya pengurangan risiko bencana dalam pembangunan berkelanjutan.

Di samping itu, dalam lingkup regional kita telah juga mengenal adanya rencana Aksi Beijing yang merumuskan strategi dan pola kemitraan dalam penanganan dan pengurangan risiko bencana di tingkat regional Asia.

Pada tataran Nasional, yang dipelopori oleh Bappenas tanggal 24 Januari 2007 di Jakarta telah melaksanakan peluncuran Buku Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) yang mengamanatkan masing-masing pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menyusun Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB).

Saudara-saudara yang berbahagia.

Melalui Lokakarya Penyusunan RAD-PRB pada hari ini, marilah kita pahami bersama kerangka kerja pengurangan risiko bencana secara terbuka.

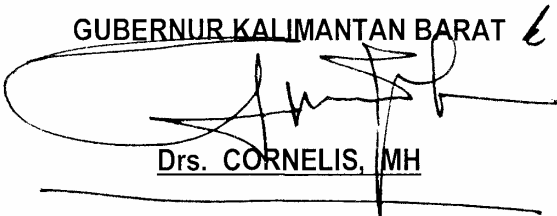
Saya berharap semoga Rencana Aksi Daerah ini dapat menjadi acuan dalam menyusun kegiatan pembangunan daerah yang berlandaskan pengurangan risiko bencana, dengan pemikiran bahwa "Mencegah itu lebih baik daripada menanggulangi", dan mari kita ubah pola pikir kita dalam menangani bencana dari responsif menjadi preventif.

Saudara-saudara hadirin yang saya hormati.

Demikian beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini untuk menjadi perhatian kita semua. Dengan memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, maka "Lokakarya Penyusunan rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana di Provinsi Kalimantan Barat hari ini Jum'at, tanggal 20 Juni 2008 secara resmi saya nyatakan dibuka".

Semoga upaya kita dalam menyelamatkan manusia dan berbagai ancaman bencana memberikan hasil yang optimal dan diridhoi Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga daerah dan negara kita dijauhkan dan bencana. Amin.

Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
Drs. CORNELIS, MH